

Tedi Kholiludin*

Madrasah, Identitas, dan Kekuasaan Kolonial: Sejarah Madrasah Nahdlatul Wathan di Semarang, 1900–1940

(*Madrasah, Identity, and Colonial Power: The History of the Nahdlatul Wathan Madrasah in Semarang, 1900–1940*)

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

tedi@unwahas.ac.id

Abstract

This article examines the growth of the Nahdlatul Wathon Madrasah in Semarang during the colonial era. Madrasah Nahdlatul Wathon was established more than a decade before the founding of Nahdlatul Ulama (NU). As an educational institution managed by traditionalist Muslim circles, the madrasah served as a new space to embody long-standing religious values. It was a branch of a similarly named madrasah in Surabaya. This study seeks to answer three key questions: What were the background factors behind the emergence of the Nahdlatul Wathon Madrasah in Semarang? How can its emergence be understood as a social process? And how does the madrasah represent the construction of indigenous Muslim identity? Data were collected through newspapers, archival sources, and other literature that describe the colonial context. Using a socio-historical approach, this study addresses the questions above. The findings suggest that the establishment of the Nahdlatul Wathon Madrasah in Semarang was driven by the expansion of this educational institution into various cities

* Corresponding author: tedi@unwahas.ac.id

Submitted: 4 May 2025, Revised: 25 June 2025, Published 1 July 2025.

How to Cite: Kholiludin, Tedi, Madrasah, Identitas, dan Kekuasaan Kolonial: Sejarah Madrasah Nahdlatul Wathan di Semarang, 1900–1940. (2025). *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 6(2), 182-207. DOI: <https://doi.org/10.47776/264xd674>

Volume 6, Number II, July 2025, Homepage: <https://journal.unusia.ac.id/index.php/ISLAMNUSANTARA/index>
E-ISSN 2722-8975



© Copyright CC BY-NC

Islam Nusantara Journal for the Study of Islamic History and Culture

and supported by Semarang's ongoing modernization. Regarding social process, the madrasah in Semarang reflects a case of cultural transposition—a vessel that preserves its original meanings and values despite being situated in a different context. Ultimately, the Nahdlatul Wathon Madrasah served a dual function for the Semarang community: it provided a new space for consolidating traditional Muslim identity and offered a new articulation of Islamic identity in an urban area that was still evolving and seeking its own form.

Keyword: *Identity, Madrasah, Nahdlatul Wathon, Semarang, Transposition.*

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji pertumbuhan Madrasah Nahdlatul Wathon di Semarang pada era kolonial. Madrasah Nahdlatul Wathon berdiri lebih dari satu dasawarsa sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai institusi pendidikan yang dikelola oleh kalangan muslim tradisional, madrasah menjadi ruang baru untuk mewadahi semangat lama. merupakan cabang dari madrasah dengan nama yang sama di Surabaya. Ada tiga msalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini; bagaimana latar belakang kemunculan Madrasah Nahdlatul Wathon di Semarang?; bagaimana kemunculan Madrasah Nahdlatul Wathon dilihat sebagai sebuah proses sosial?; dan bagaimana konstruksi identitas masyarakat muslim pribumi direpresentasikan oleh Madrasah Nahdatul Wathon? Data-data didapatkan melalui surat kabar, arsip serta bahan pustaka lainnya yang menggambarkan situasi pada masa kolonial. Dengan pendekatan sosio-historis, penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kesimpulannya, pendirian Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang dilatar oleh perkembangan lembaga pendidikan ini ke berbagai kota dan didukung oleh desain Semarang yang terus mengalami modernisasi. Dalam konteks proses sosial, Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang mencirikan sebagai transposisi kultural, wadah yang tetap mempertahankan makna dan nilainya meski berada pada posisi berbeda (*cultural transposition*). Pada akhirnya madrasah Nahdlatul Wathon memiliki dua berfungsi berbeda bagi masyarakat Semarang; ruang baru untuk melakukan konsolidasi identitas sebagai muslim tradisional dan artikulasi baru identitas keislaman di wilayah yang sedang tumbuh dan mencari bentuknya sendiri.

Kata kunci: Identitas, Madrasah, Nahdlatul Wathon, Semarang, Transposisi.

الملخص

تناول هذه الدراسة نمو مدرسة نهضة الوطن في مدينة سمارانغ خلال الحقبة الاستعمارية. تأسست مدرسة نهضة الوطن قبل أكثر من عقد من تأسيس جماعة نهضة العلماء، وقد شكلت، بصفتها مؤسسة تعليمية تدار من قبل أوساط المسلمين التقليديين، فضاءً جديداً لتجسيد القيم الدينية الراسخة. وكانت هذه المدرسة فرعاً لمدرسة تحمل الاسم نفسه أنشئت في مدينة سورابايا. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة محورية: ما العوامل التي شكلتخلفية التاريخية لظهور مدرسة نهضة

الوطن في سمارانغ؟ كيف يمكن فهم هذا الظهور بوصفه عملية اجتماعية؟ وكيف تعكس هذه المدرسة بناء الهوية الإسلامية المحلية؟

تم جمع البيانات من خلال الصحف، والمصادر الأرشيفية، والأدبيات الأخرى التي تصف السياق الاستعماري. وباستخدام المنهج السوسيولوجي-التاريخي، تسعى هذه الدراسة لمعالجة الأسئلة المطروحة. تشير النتائج إلى أن تأسيس مدرسة نهضة الوطن في سمارانغ جاء بداعي التوسيع الجغرافي لهذه المؤسسة التعليمية إلى مدن متعددة، مدوماً بموجة التحديث التي كانت تشهدها مدينة سمارانغ في تلك الفترة. أما من حيث العملية الاجتماعية، فإن المدرسة تمثل نموذجاً لما يمكن تسميته بـ"النقل الثقافي"؛ إذ حافظت على معانيها وقيمها الأصلية رغم انتقالها إلى سياق حضري مختلف. وفي نهاية المطاف، أدرت مدرسة نهضة الوطن في سمارانغ دوراً مزدوجاً داخل المجتمع المحلي؛ فمن جهة كانت فضاءً جديداً لترسيخ الهوية الإسلامية التقليدية، ومن جهة أخرى مثلت صيغة جديدة لتجسيد الهوية الإسلامية في مدينة حضرية كانت لا تزال في طور التشكيل والبحث عن ذاتها.

الكلمات المفتاحية/الرئيسية: سيمارانج، نهضة الوطن، المدرسة، النقل، الهوية.

1. Pendahuluan

Di era kolonial, pendidikan bagi kalangan bumiputera menjadi masalah serius karena pemerintah tidak menyediakan fasilitas tersebut untuk seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan politik etis yang dimulai pada awal abad 20, tidak sepenuhnya menyentuh seluruh warga Hindia Belanda. Kebijakan politik etis dimulai dengan diskusi serius setelah terbitnya tulisan Conrad Theodore van Deventer pada tahun 1899 yang berjudul *Een Eereschuld* atau Utang Budi. Van Deventer mengatakan bahwa bangsa Belanda sangat berhutang budi kepada bangsa Hindia karena banyak keuntungan yang diperoleh selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu.¹ Dua tahun kemudian, Ratu Wilhelmina mengumandangkan bermulanya zaman baru dalam politik kolonial, yang disebut politik etis.² Meski kekuatan dari gagasan politik etis ini berkembang pasca tulisan van Deventer, tetapi bagian politik etis yang mencolok sudah dilaksanakan sebelum ia menulis *Een Eereschuld*.³ Harry Poeze menyebut, politik etis ini semacam kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia dibawah kekuasaan Belanda secara nyata dan untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda dengan model Barat.⁴

Akibat dari kebijakan tersebut, sebagian dari kalangan bumiputera bisa menikmati pendidikan. Politik etis meluaskan pengaruh kolonial melalui dunia pendidikan. Pemerintah kolonial mendirikan *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* sebagai sekolah dengan status

¹ Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*, terj. "Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1928" (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 27

² Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*, terj. "Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1928", h. 27-28.

³ Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*, terj. "Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1928", h. 27-28.

⁴ Harry A. Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda* (Jakarta: KPG, 2008), h. 25

tertinggi. Bahasa Belanda menjadi pengantar di sekolah tersebut.⁵ Meski begitu, mereka yang bisa menikmati pendidikan ini terbatas pada mereka yang memiliki jabatan atau birokrat.

Jenis sekolah sekolah lain yang mengakomodir golongan pribumi juga didirikan oleh Belanda, seperti Sekolah Desa. Lembaga ini oleh pemerintah kolonial didirikan dengan tujuan untuk "membantu meluaskan pengertian yang benar mengenai berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan dekat orang desa dan tidak akan mungkin tercapai hanya dengan keterangan-keterangan lisan dari guru desa saja tanpa alat-alat pembantu."⁶

Selain fasilitasi dalam bidang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kolonial sebagai dampak dari politik etik, awal abad 20 juga ditandai oleh munculnya gerakan nasionalis atau *Nationalistische Beweging*. Menurut Blumberger, gerakan nasionalistis atau nasionalisme bisa digambarkan sebagai pemikiran di kalangan bumiputra yang bisa juga disebut sebagai gerakan pribumi (*Inlandsche Beweging*) atau gerakan rakyat pribumi (*Inheemsche Volksbeweging*).⁷ Gerakan nasionalis di Hindia Belanda, kata Blumberger, tak terbatas pada ikatan rasial, keagamaan atau kedaerahan, tetapi juga bisa digambarkan sebagai nasionalisme etnis, religius dan lokal. Menjadi menarik untuk dipahami, karena pertumbuhan Gerakan tersebut menggambarkan tahapan dalam proses evolusi masyarakat Hindia Belanda, meski dalam batas-batas tertentu mereka bisa berbeda pemahaman tentang apa yang disebut sebagai nasionalisme.⁸

Lahirnya berbagai gerakan nasionalis sebagai manifestasi kesadaran akan kecintaan tanah air diikuti oleh keinginan kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu alat perjuangan. Mereka menyadari bahwa pendidikan yang terfasilitasi dalam berbagai bentuk, sekolah maupun madrasah serta wujud lainnya, menjadi modal yang sangat berharga. Modal tersebut akan sangat bermakna ketika kesadaran baru yang muncul nantinya akan menjadi basis bagi transformasi secara politik.

Organisasi-organisasi yang tumbuh awal abad 20 dan bercorak Islam atau menggunakan Islam sebagai identitasnya, juga turut berpartisipasi dalam membangun kualitas sumberdaya manusia bumiputra. Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta organisasi lainnya juga turut berpartisipasi. Di Semarang, Sarekat Islam membuat sekolah dengan Tan Malaka sebagai aktor utamanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammadiyah yang berpusat di Yogyakarta. Sementara Nahdlatul Ulama melakukan transformasi bidang pendidikan dari basis sosialnya yakni pesantren ke sebuah wadah baru bernama madrasah.

Orang-orang Belanda di Hindia sering menyimpulkan kondisi pesantren dengan nada negatif. Jan Frederik Gerit (JFG) Brumund, seorang pendeta yang berkarya di Jawa Timur dan

⁵ I.J. Brugmans, *Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*, (Groningen-Batavia: J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij, 1938), h. 317.

⁶ *Pendidikan di Indonesia, 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h.74-6.

⁷ J.Th., Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*, (HD Tjeeng Willink & Son,1931). h. 1

⁸ J.Th., Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*, h. 1.

memiliki ketertarikan pada budaya Jawa, menggambarkan secara stigmatis posisi kiai di pesantren. Kata Brumund, kiai adalah orang yang sama saja dengan imam langgar, tidak pandai dan memelihara takhayul.⁹ Kiai sedikit lebih licik dan cerdik, dan tak jarang, sang ia adalah penindas serta pemeras umat dan muridnya sendiri.¹⁰ Gambaran tersebut ini adalah bagian dari wacana kolonial Belanda yang kerap memandang kelompok Islam tradisional sebagai penghambat atas kemajuan karena tidak rasional, tidak modern, dan seterusnya. Wacana dominan seperti asumsi Brumund tersebut bisa dipahami sebagai upaya delegitimasi atas kepemimpinan lokal berbasis pesantren, yang pada masa itu menjadi basis sosial penting dalam membangun daya tawar terhadap pemerintah kolonial.

Semarang merupakan salah satu wilayah di Hindia Belanda yang memiliki geliat pergerakan kebangsaan yang dinamis. Di kota ini, gerakan nasional yang bercorak komunisme tumbuh subur setelah berhasil melakukan infiltrasi terhadap Sarekat Islam cabang Semarang. Meski begitu, pada saat yang sama, Nahdlatul Ulama sebagai representasi kelompok keagamaan tradisional juga berkembang di kota ini. Bahkan, pertemuan rutin tahunan atau muktamar pertama di luar Surabaya setelah organisasi ini berdiri pada 1926, dilangsungkan di Semarang pada 1929. Seperti halnya organisasi-organisasi yang tumbuh di awal abad 20, Nahdlatul Ulama menjadikan madrasah, selain pesantren, sebagai salah satu wadah untuk kaderisasi pelanjut tradisi keagamaannya.

Sebelum Nahdlatul Ulama secara formal berdiri, madrasah-madrasah yang secara substantif sama dengan pesantren sudah terlebih dahulu berkembang sejak 1914/1915. Untuk menegaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut memiliki nafas kebangsaan, ada nama “wathon” di belakangnya yang berarti bangsa atau tanah air. Madrasah Nahdlatul Wathon di Surabaya menjadi pusatnya. Madrasah berakhiran “wathon” ini tersebar pada berbagai tempat di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Semarang. Sebelum NU Cabang Semarang berdiri pada 1928, ada madrasah berakhiran Wathon yang muncul dan diyakini sebagai pengembangan atau semacam “cabang” dari Madrasah Nahdlatul Wathon di Surabaya.

Dengan mendudukannya dalam konteks Semarang sebagai salah satu basis pergerakan, menarik untuk mencermati perkembangan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh Nahdlatul Ulama melalui Madrasah Nahdlatul Wathon. Penelitian ini hendak mencari jawaban atas tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana latar belakang kemunculan Madrasah Nahdlatul Wathon di Semarang? Kedua, bagaimana kemunculan Madrasah Nahdlatul Wathon jika dilihat sebagai sebuah proses sosial? Ketiga, bagaimana konstruksi identitas masyarakat muslim pribumi direpresentasikan oleh Madrasah Nahdatul Wathon?

Kajian ini akan diawali dengan elaborasi mengenai deskripsi mengenai; sekolah dengan corak berbeda di Semarang (Sekolah Sarekat Islam dan Madrasah Muhammadiyah); Madrasah

⁹ J.F.G. Brumund, *Het Voksonderwijs onder de Javanen*, (Batavia: van Haren Noman & Kolff, 1857), h. 24.

¹⁰ J.F.G. Brumund, *Het Voksonderwijs onder de Javanen*, Ibid., h. 25.

Nahdlatul Wathon Semarang sebelum 1926 (berdirinya Nahdlatul Ulama); Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang 1928-1929; Madrasah Nahdlatul Wathon dalam Kerangka Kebijakan Pemerintah Kolonial; dan Proses Sosial dan Konstruksi Identitas Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang yang ditempatkan sebagai kerangka analisis.

2. Metode

Penelitian ini merupakan studi tentang sebuah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah tertentu. Madrasah Nahdlatul Wathon yang menjadi objek penelitian adalah lembaga yang berada di Semarang, khususnya di dua wilayah berbeda; Kauman dan Jombang. Perbedaan karakteristik dua wilayah, meski sama-sama di satu kota, akan berimplikasi pada variatifnya analisis terhadap lembaga tersebut. Karena objek penelitian dibatasi kurun waktunya pada masa kolonial (1900- 1942), maka data-data yang disajikan diperolah dari sumber yang terbit pada masa tersebut. Untuk elaborasi mengenai aktivitas Nahdlatul Ulama dan Madrasah Nahdlatul Wathon sumber data berasal dari Swara Nahdlotel Oelama (SNO) yang merupakan media resmi Hoofdbestuur (Pengurus Besar) Nahdlotel Ulama yang berkedudukan di Surabaya. Media milik organisasi lainnya yang digunakan sebagai sumber adalah Soeara Ra'jat (Partai Komunis Indonesia), Islam Bergerak (Haji Misbach (Haji Merah) dan Inlandsche Journalisten Bond atau IJB), serta media massa yang terbit pada masa tersebut seperti *De Locomotief*, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, *Djawa Tengah* dan lainnya.

Pendekatan sosio-historis akan dilakukan untuk menginterpretasi eksistensi Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang. Apa yang disebut sebagai sosio-historis adalah metode yang memadukan antara kajian sejarah -penelusuran peristiwa, kronologi, tokoh serta konteks zaman- dan analisis sosiologis melalui telaah atas relasi sosial, struktur masyarakat, dinamika kekuasaan, ideologi serta transformasi yang berlangsung. Sebagai sebuah kajian yang bersifat interdisipliner, pendekatan sosio-historis ini tidak hanya mengetahui “apa yang terjadi”, tetapi juga mengapa itu terjadi, siapa yang terlibat, dan apa implikasinya secara sosial.¹¹

Pelibatan teori-teori sosiologis akan dilakukan ketika menganalisis data-data yang bersifat historis. Dalam kerangka ini, kajian mengenai transformasi sosial menjadi optik dalam menganalisis latar belakang pertumbuhan Madrasah Nahdlatul Wathon. Sementara dalam bingkai konstruksi identitas, pembelahan konteks masyarakat Semarang secara spasial akan membantu memunculkan analisis terhadap motivasi pertumbuhan lembaga tersebut di dua ruang spesifik yang berbeda meski ada dalam kesamaan wilayah administratif.

3. Hasil dan Diskusi

1. Sekolah Sarekat Islam dan Madrasah Muhammadiyah di Semarang

Sarekat Islam Cabang Semarang merupakan salah satu organisasi sosial yang memiliki konsep pada dunia pendidikan. Pada masa kepengurusan awal Sarekat Islam, perbincangan

¹¹ Darren M. Slade, “What is the Socio-Historical Method in the Study of Religion?,” *SHERM* 2/1 (2020): 1–15.

mengenai kebutuhan akan pendidikan sudah sering dibahas.¹² Baru tersedia satu sekolah untuk anak-anak pribumi yang dirasakan belum bisa memfasilitasi kebutuhan. Banyak anak-anak yang harus menunggu masuk sekolah di tahun berikutnya karena kursi yang tersedia telah terisi, dan begitu seterusnya. Pada 1921, atas arahan Semaun sebagai Ketua SI Semarang, Tan Malaka mendirikan Sekolah Sarekat Islam atau “SI School” di Semarang sekaligus sebagai pemimpinnya.¹³ Semaun mengamanatkan Tan Malaka untuk mengamankan visi besar untuk memfasilitasi sekolah bagi warga bumiputera. Kata Semaoen, “soedah lama kita mengharap akan boleh mendirikan sekolah-sekolah rendah jang dapat memberi pengajaran dan didikan sepadan dengan hal-hal itoe jang diberikan dalam sekolah-sekolah Djawa-Belanda Gouvernement.”¹⁴ Berdirinya sekolah itu, lanjut Semaun dimaksudkan agar “... kita menolong sedikit kepada anak-anak kita jang karena kekoerangan tempat atau liwat oemoer tidak dapat dipongoet dalam sekolah-sekolah gouvernemet.”¹⁵

Saat memutuskan untuk memilih Tan Malaka, Semaun menjelaskan bahwa ia “telah mendapat saorang Goeroe dari fihak kita sendiri, jang akan dengan seneng ati memenoehi keperluan didikan itoe.”¹⁶ Semaun menyadari pentingnya kemampuan berbahasa Belanda, yang pada saat itu, bisa menjadi salah satu tiket untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. “Siapakah soedara Malaka itoe? Dialah soedara kita sendiri, jang soedah tamat beladjar sekolah di negeri Belanda dan telah mendapat akte Goeroe Belanda.”¹⁷

Soeara Ra’jat edisi 1-16 Juni dan 1 Juli 1921 memberitakan perkembangan Sekolah Sarekat Islam (selanjutnya ditulis SI School) di Kampung Gendong, Semarang.¹⁸ Setelah dibuka pada Selasa, 21 Juni 1921, SI School menjadi tempat belajar 80 orang murid dan masih akan banyak lagi yang hendak bersekolah di tempat tersebut. Seperti diberitakan Soeara Ra’jat, masih belum banyak yang mengetahui sekolah tersebut, sehingga kehadirannya harus terus disosialisasikan¹⁹. Banyak atau sedikitnya mereka yang belajar di SI School akan menentukan berapa banyak kelas yang akan dibuka serta jumlah guru yang akan menjadi pengajarnya. Guru-guru baru akan sangat membantu Tan Malaka dalam memberikan pengajaran. Untuk biaya SI School sudah menetapkan besarnya, yakni tiga rupiah. Apa yang dilakukan di Semarang, harapannya bisa memantik pengurus SI di kota-kota lain seperti Bandung atau Surabaya bisa membuka SI School serupa. Tan Malaka mengatakan bahwa tujuan SI School bukan untuk mendidik murid menjadi juru tulis atau *gupernemen*, melainkan untuk membantu rakyat dalam pergerakannya sekaligus mncari nafkah diri sendiri serta keluarga.²⁰

¹² *Bataviaasch Nieuwsblad*, 9 Mei 1914.

¹³ Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* (Cornell University Press, 1990), h. 244.

¹⁴ Soeara Ra’jat, No. 8, 30 April 1921.

¹⁵ Soeara Ra’jat, No. 8, 30 April 1921.

¹⁶ Soeara Ra’jat, No. 8, 30 April 1921.

¹⁷ Soeara Ra’jat, No. 8, 30 April 1921.

¹⁸ Soeara Ra’jat 1-16 Juni dan 1 Juli 1921.

¹⁹ Soeara Ra’jat 1-16 Juni dan 1 Juli 1921.

²⁰ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara*, (Yogyakarta: NARASI, 2008), h. 94.

Tak lama setelah pembukaan SI School, SI Semarang kembali membuka satu sekolah dengan tambahan satu pelajaran penting, Bahasa Belanda. Tan Malaka kembali menjadi mentor untuk sekolah baru tersebut. 120-an orang murid tercatat bersekolah di SI School kedua. Tak hanya laki-laki yang bersekolah, tetapi juga kaum perempuan. Di sekolah itu, Tan Malaka dibantu guru-guru perempuan alumni Kartinischool. Tertulis di Soera Ra'jat, "Berkat Toehan! Dengan oesahanja S.I. Semarang dan teroetama dengan bantoeannja soedara Malaka, jang benar-benar memfikir kepenitngan Ra'jat itoe, sekarang sekolah Islam S.I. Semarang soedah bisa mengadakan afdeeling bahasa Belanda, jang tingkat pengadjarannja bisa mempenoehi tjita-tjita kaoem kita jang soedah lama terkandoeng dalam hati itoe."²¹

Karena kegiatan belajar mengajar berlangsung, mulailah terlihat kekurangan infrastruktur di Sekolah Sarekat Islam (SI School Semarang), apalagi lembaga pendidikan untuk kalangan bumiputera itu sudah memiliki satu cabang yang didalamnya ada pengajaran Bahasa Belanda. Kekurangan bukan hanya pada tenaga pengajar, tetapi juga tempat serta infrastruktur lainnya. Tan Malaka, yang sudah mengabdikan dirinya untuk menjadi guru, perlu mendapatkan dukungan lain dalam bentuk perlengkapan sekolah. Keinginan untuk menyediakan tempat yang layak bagi pengajaran hanya akan terealisasi jika ada ketercukupan dana. Memperluas tempat, penyediaan bangku serta meja dan seterusnya, sudah pasti membutuhkan dana besar. Inilah masalah bagi kaum kromo (dan sebagian besar warga bumiputera), karena mereka tidak memiliki ketercukupan dana untuk pemenuhan itu.

Pimpinan SI Semarang kemudian memutuskan untuk membuat Pasar Derma agar bisa mendukung SI School.²² Sayangnya, kegiatan itu tidak jadi dilaksanakan karena pada 13 Agustus 1921, Asisten Residen Semarang tidak memberikan izin. Pada 20 Agustus 1921 Kadarisman dan Budisucitro (Boedisoetjitro) sebagai wakil SI Semarang menghadap Asisten Residen untuk mempertanyakan alasan penolakan kegiatan Pasar Derma.²³ "...atas pertanyaan doea orang lid bestuur S.I. itoe ialah berhoeboeng dengan hal, bahwa pasar jang sedemikian itoe diadakan goena kepentingan sekolahan jang akan mendidik rasa kemerdekaan dan bahwa goeroe kepala dalam sekolah itoe ada seorang Communist," demikian tulis Soeara Ra'jat.²⁴ Pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap Semaun dan SI Semarang sejatinya tak hanya soal Pasar Derma. Ketika Semaun mulai menyebarkan inti dari ajaran Komunisme, pemerintah juga terus mengawasi dan memintanya untuk segera menghentikan kursus atau pengajaran yang dilakukan Semaun.²⁵

Kegiatan Pasar Derma yang dilakukan oleh SI Bandung juga berasas sama. Rencananya 4-7 Maret 1922 pengurus SI setempat akan mengadakan Pasar Derma untuk memfasilitasi kegiatan di SI School yang telah dibuka pada 9 Januari 1922. Ketika kegiatan dibuka pada Hari

²¹ Soeara Ra'jat Nomor 15, tanggal 16 Agustus 1921.

²² Soeara Ra'jat Nomor 16 tanggal 31 Agustus 1921.

²³ Sinar Hindia, 23 Agustus 1921.

²⁴ Soeara Ra'jat Nomor 16, tanggal 31 Agustus 1921.

²⁵ Djawa Tengah, 27 Mei 1921.

Sabtu, 4 Maret 1922 pukul 8 pagi, polisi datang ke tempat kegiatan dan menutup Pasar Derma.²⁶ Karena kegagalan menggalang Pasar Derma ini, S. Goenawan, voorzitter SI Bandung sekaligus yang bertanggungjawab untuk kegiatan, jatuh sakit. Masyarakat yang sudah datang berduyun-duyun terpaksa pulang. Dengan bersungut-sungut dan berlinang air mata, mereka bergumam, “O...Pemerentah, Kau Terlaloe.”²⁷

Meskipun kegiatan Pasar Derma dilarang oleh Pemerintah Belanda, pengurus SI Semarang tidak kekurangan akal untuk penggalian dana. Yang jelas, jalan untuk menggali dana tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara. Prinsipnya, *hetgeen men verlangt, zal men wel krijgen. Waar en wil is, is een weg*; siapa yang menginginkan, ia akan mendapatkan. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan.²⁸ Cara baru yang ditempuh pengurus SI berasal dari Semaun. Mereka mengajak empat hingga lima orang siswa SI School yang dipimpin satu orang dewasa, masuk ke kampung-kampung. Anak-anak itu meminta sumbangan seikhlasnya kepada masyarakat untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah SI. Pimpinan dari empat atau lima orang siswa itu yang menerangkan kepada warga peruntukan sumbangan yang diberikan. Sembari melantunkan “Internationale,” anak-anak tersebut mendatangi tiap-tiap rumah warga untuk meminta sumbangan.

“Kita tiada selempang hati, bahwa di kampeong-kampoeng, di mana ada berdiam sebagian besar kaoem kromo itoe, memang tempat kita mentjari kekoeatan Air setitik jang ditjoerahkan dari beberapa tempat, boleh menjadi soeatoe mata-air jang besar,” demikian tekad dari para pengurus SI Semarang seperti ditulis dalam Soeara Ra’jat.²⁹ Pengurus SI, seperti dikutip Soeara Ra’jat, menegaskan bahwa kaum kromo yang mendermakan uangnya, tidak lantas membuat mereka akan jatuh pada kemiskinan. Derma yang diberikan sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi modal besar untuk memperluas sekolah dan membuatnya lebih layak. Hasil dari apa yang ditanam oleh kaum kromo pada hari ini, akan diunduh oleh kaum kromo juga di kemudian hari.

Muhammadiyah juga mendirikan sekolah atau madrasah di Semarang. Aktivitas kelompok Muhammadiyah sendiri di Semarang, setelah organisasi tersebut didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 1912,³⁰ baru tersiarkan pada tahun 1926-1927. Kegiatan kelompok ini terpusat di rumah Achmad Machrus di Kampung Darat. Melalui sekolah atau madrasah, Muhammadiyah Semarang berperan penting dalam memajukan kualitas anak bangsa dalam bidang pendidikan pada masa awal-awal perkembangan organisasinya. Kelompok ini mendesain sebuah model pendidikan Islam modern yang memadukan pengetahuan keislaman

²⁶ Islam Bergerak, 1 April 1922.

²⁷ Islam Bergerak, 1 April 1922.

²⁸ Soeara Ra’jat, 31 Agustus 1921.

²⁹ Soeara Ra’jat, 31 Agustus 1921.

³⁰ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 113; Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), h. 61; Abdul Mu’ti Ali, “The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction,” *Tesis Master*, Institute of Islamic Studies, McGill University, 1957, h. 61.

dan umum.³¹ Pada 1925, Muhammadiyah sudah memiliki 8 Hollandsch Inlandsche School, satu Sekolah Guru, 32 Sekolah Kelas Dua, sebuah Schakelschool, 14 madrasah, dan 119 orang guru.³²

Pengakuan secara legal perkumpulan Muhammadiyah Semarang terjadi pada 20 Juli 1927.³³ Meski begitu, pelayanan bidang pendidikan sudah dilakukan sebelumnya. Mulai tanggal 1 Juli 1927 perkumpulan Muhammadiyah telah menyelenggarakan HIS dan kursus Bahasa Belanda sore hari.³⁴ Nama madrasah ini adalah HIS met de Quran dan berubah menjadi HIS Muhammadiyah yang berlokasi di Pindrikan. Selain pendidikan agama dalam bentuk madrasah dan bertransformasi menjadi HIS, Muhammadiyah Semarang juga mengelola kursus Bahasa Inggris dan Belanda di Gedung HIS Muhammadiyah Kampung Gendingan, serta kursus Bahasa Inggris di Kampung Kuningan, Darat yang sudah dilaksanakan pada 3 November 1931. Aisyiyah juga mengelola kursus menulis dan membaca bagi mereka yang tidak berkesempatan bersekolah serta membangun taman pustaka meminjamkan buku secara gratis.³⁵

Secara kompetitif, Muhammadiyah turut menjadi sokoguru bagi umat Islam dan bersaing dengan kelompok lainnya. Mereka membekali siswanya belajar bahasa Melayu, bahasa Belanda, sehingga bisa bersaing dalam kehidupan modern. Muhammadiyah memberikan siswanya pengetahuan dalam berbagai bidang; bahasa, ilmu bumi, ilmu hitung dan sebagainya, disamping ilmu agama tentu saja. Sebagai organisasi sosial, Muhammadiyah tidak mengambil jalan konfrontatif terhadap pemerintah kolonial, sehingga aktivitas yang dilakukannya tidak mendapatkan restriksi.

Sebagai organisasi yang turut mewarnai dinamika kebangsaan serta pembaharuan, Sarekat Islam dan Muhammadiyah terlibat dalam konflik. Pada tahun 1926, hubungan antara Sarekat Islam dengan Muhammadiyah semakin menajam. Kalangan Sarekat Islam menuduh Muhammadiyah mulai menjalankan kompromi dengan pemerintah.³⁶ Ini dibuktikan dengan penerimaan subsidi oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah³⁷ yang menjadikan kalangan Sarekat Islam menyebut mereka sebagai “organisasi anti-politik,” sebuah label yang sangat buruk karena menggambarkan keberpihakan pada pemerintah kolonial.³⁸

³¹ Mukhamad Shokheh, et.al., “From Islamic Teaching to Social Charity: The Muhammadiyah Movement in Semarang, Central Java, Indonesia; 1926-1940,” *Asian Culture and History*; Vol. 10, No. 2; 2018, h. 62.

³² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 95.

³³ *De Locomotief*, 25 Juli 1927.

³⁴ *De Locomotief*, 25 Juli 1927.

³⁵ Aktivitas-aktivitas pendidikan Muhammadiyah bisa dibaca dalam Muhammad Shokeh, *Gerakan Keagamaan dan Perubahan Sosial: Dakwah Islam dan Misi Katolik di Semarang 1890-1940*, (Pati: Kireinara, 2014), h. 165-8

³⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 256-257.

³⁷ I.J. Brugmans, *Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*, (Groningen-Batavia: J.B. Wolters’s Uitgevers-Maatschappij, 1938), h. 361-2.

³⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 257.

2. Akhul Wathon: Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang Sebelum 1926

Salah satu lembaga yang muncul sebelum Nahdlatul Ulama dideklarasikan pada 31 Januari 1926 adalah sebuah organisasi yang pada perkembangannya sangat konsen pada pendirian berbagai madrasah, yakni Nahdlatul Wathon. Kelahirannya tak lepas dari peran para Kiai di Surabaya, diantaranya KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Hasan Gipo, KH. Ridlwan bin Abdullah, KH. Mas Mansoer, Haji Abdulkahar (juga ditulis Abdul Qahar) dan banyak nama lainnya. Dalam susunan kepengurusan, KH. Abdul Qahar didapuk sebagai Direktur, KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai pimpinan Dewan Guru (keulamaan) dan KH. Mas Mansur menjadi Kepala Sekolah dibantu KH. Ridwan Abdullah. Pada tahun 1916, Nahdlatul Wathan resmi berbadan hukum (*rechstspersoon*) dan menempati gedung bertingkat di daerah Kawatan, Surabaya.³⁹

Sebelum berbadan hukum, pendirian Nahdlatul Wathan sudah diberitakan oleh media “*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*” edisi 23 November 1915. Koran ini memberitakan rapat pengurus pendirian Nahdlatul Wathan yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1915.⁴⁰ Tujuan didirikannya seperti diberitakan oleh koran tersebut adalah untuk mempromosikan pendirian sekolah agama yang lebih maju dari langgar atau pesantren yang ada. Pada rapat tersebut, pimpinan Sarekat Islam, Cokroaminoto juga hadir. Dalam kesempatan itu, Cokroaminoto mengatakan bahwa dasar persatuan adalah percaya satu dengan yang lain dan kita mesti sampai pada kepercayaan bersama ketika beribadah dengan agama yang sama.⁴¹ Meski telah mendapatkan legalitas pada 1916, Madrasah Nahdlatul Wathon sendiri hingga April tahun 1917 belum dibuka.⁴² Gambaran tersebut bisa dicermati ketika membaca iklan berdirinya Nahdlatul Wathon di Koran *Islam Bergerak* Edisi 10 April 1917. Meski begitu, wakaf dan sedekah dari para donatur sudah diterima oleh pengurus madrasah.

Nahdlatul Wathan lalu didesain sebagai medan latih serta kawah candra dimuka bagi penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui jalur pendidikan. Di tengah perjalanan, mulai muncul perbedaan pandangan antara Kiai Wahab dengan Kiai Mas Mansur. Pada tahun 1922, Kiai Mas Mansur memutuskan untuk bergabung dengan Muhammadiyah dan meninggalkan Nahdlatul Wathan. KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz akhirnya ditunjuk menggantikan Kiai Mas Mansur.⁴³ Struktur baru ini terus bergerak membangun cabang di berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang.

Kehadiran lembaga pendidikan di kalangan warga Nahdliyyin di Semarang sebelum berdirinya NU pada 1926, bisa dibaca dalam kiprah KH. Abdul Wahab Hasbullah seperti yang ditulis oleh KH. Abdul Chalim Leuwimunding (Majalengka) yang pada kepengurusan Hoofdbestuur NU pertama menjadi Katib Tsani (Kedua). Kata Kiai Abdul Chalim;

³⁹ Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab* (Bandung, Baru, 1970), h. 9.

⁴⁰ *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, Edisi 23 November 1915.

⁴¹ *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, Edisi 23 November 1915.

⁴² *Islam Bergerak*, 10 April 1917.

⁴³ Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab* (Bandung, Baru, 1970), h. 9.

Kemudian Pak Kiai Abdul Wahab nyata, Mutlak mendukung Nahdlatul Wathon nyata
Dengan Kiai Mas Alwi dan teman-temannya, terus jalan membangun cabang-cabangnya
Di Semarang Malang dan Gresik nyata, Akhul Wathon far'ul Wathon yang di kota
Hidayatul Wathon di Jagalan nyata, Khitobatul Wathon Pacarkeling juga.⁴⁴

Perkembangan Nahdlatul Wathon meluas ke berbagai wilayah. Sekolah-sekolah itu ada yang menggunakan nama Nahdlatul Wathon tetapi juga nama lain, tetapi semuanya bernama belakang “wathon.” Di Semarang, sekolah tersebut diberi nama “Akhul Wathon,” seperti yang tertera dalam syi’ir sejarah Kiai Abdul Chalim. Penjelasan Kiai Abdul Chalim tentang perkembangan Nahdlatul Wathon dan eksistensi Akhul Wathon di Semarang menyuguhkan fakta, bahwa sebelum 1926 (berdirinya NU) atau 1928 sebagai titimangsa terbentuknya NU Cabang Semarang, ada basis sosial yang tersedia di kota ini. Lapisan tersebut, tidak berdiri sendiri, tetapi terkoneksi dengan jejaring yang lain. Ketika NU lahir di Semarang, karenanya, ia bukanlah fenomena tiba-tiba, tetapi semacam pelembagaan dari basis sosial yang sesungguhnya memiliki hubungan dengan sokoguru serupa di tempat lain yang memiliki karakteristik serta tujuan yang sama. Kiai Abdul Chalim sendiri berperan dalam proses menghubungkan antar basis sosial ini. Sebelum NU berdiri, atau sebelum muktamar dilaksanakan di Semarang 1929, Kiai Abdul Chalim sering datang ke Semarang dan mendirikan sebuah sekolah.⁴⁵

Karel A. Steenbrink membenarkan fakta bahwa pada 1922 Nahdlatul Wathon sudah memiliki beberapa cabang termasuk Semarang yang mungkin pendiriannya sendiri bisa jadi sudah terjadi sebelum 1922.⁴⁶ Ia tidak menyebut nama cabang di Semarang itu, apakah Nahdlatul Wathon atau Akhul Wathon, namun Steenbrink menjelaskan, ada kiai setempat yang menjadi penggagas sekaligus penanggungjawab berjalannya sekolah tersebut. Aboebakar Atjeh, penulis biografi KH Wahid Hasyim menulis, di Semarang, Akhul Wathon atau Nahdlatul Wathon, didirikan dan digerakkan atas inisiatif Kiai Ridwan, Kiai Toha, Haji Abdul Gapur dan Haji Hanum Nafis.⁴⁷ Kiai Ridwan yang dimaksud adalah Kiai Ridwan bin Ahmad Mujahid, Mustasyar pertama Hoofdbestuur NU, sementara Kiai Toha (bin Husein) adalah Presiden Nahdlatul Wathon di Kauman tahun 1929.

Hadirnya Nahdlatul Wathon di Semarang, bahkan sebelum NU didirikan, menunjukkan adanya struktur sosial yang saling terkait. Sebagai salah satu tokoh kunci dalam pertumbuhan NU di Semarang, Kiai Ridwan Mujahid, dengan begitu, telah terkoneksi dengan banyak kiai, termasuk Kiai Abdul Wahab dan Kiai Abdul Chalim.

⁴⁴ Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab* (Bandung, Baru, 1970), p. 10.

⁴⁵ Nur Khalik Ridwan, *KH. Abdul Chalim Leuwimunding: Anti Kolonial, Merintis Kemerdekaan dan Mendirikan NU 1890-1930* (Yogyakarta: NDiko Publishing, 2024), h. 453-4

⁴⁶ Karel A. Steenbrink, Pesantren, *Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 66-7.

⁴⁷ Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), h. 526.

3. Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang 1928-1929: Antara Jomblang dan Kauman

NU Semarang dibentuk pada Jumat (malam) 8 Rabiul Awal 1347 H atau bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 1928.⁴⁸ Setelah terbentuknya pengurus yang menjadi cabang dari Hoofdbestuur NU, kepengurusan Cabang Semarang terus menggiatkan aktivitas dakwah dan pendidikan melalui madrasah.⁴⁹

Yang pertama didirikan adalah Madrasah Nahdlatul Wathon di Jomblang Kidul. Berdirinya madrasah ini diketahui dari surat yang dikirimkan oleh Hamim bin Kholid (dari Kauman).⁵⁰ Hamim mengirim surat kepada Nahdlatul Wathon Surabaya (Pusat) untuk menjadikan Madrasah Nahdlatul Wathon di Jomblang, Semarang, sebagai cabangnya. Pada 30 Rabiul Awal 1347 H (15 September 1928), ia telah mengadakan pertemuan untuk meminta pengesahan pengurus Madrasah Nahdlatul Wathon Jomblang Kidul. Musyawarah berikutnya, 24 September 1928 memutuskan untuk menggunakan serambi masjid sebelum mendapatkan tempat untuk madrasah. Kegiatan dimulai pada 13 Oktober 1928 (disebutkan hari Senin, tetapi dalam kalender, Senin itu tanggal 15 Oktober 1928) dengan menerima 13 murid, dan bertambah esok harinya menjadi 22 murid dan di akhir pekan sudah ada 52 murid dan ada 84 murid hingga pertengahan Oktober 1928.⁵¹

Dalam pertemuan yang pada akhirnya disepakati berdiri Madrasah Nahdlatul Wathon di Jomblang, Semarang, Hamim berkisah tentang perjalanannya ke Surabaya dan Gresik untuk mencermati dan mempelajari pengelolaan madrasah di dua kota tersebut. Mas Suryadireja ditunjuk sebagai Presiden Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang. Umar bin Haji Mu'min yang menjadi tuan rumah pertemuan kedua sebagai wakilnya. Hamim sendiri bertindak sebagai kasir. Hampir semua *bestuur* atau pengurus Madrasah Nahdlatul Wathon berasal dari wilayah Jomblang (Wetan dan Kulon) kecuali Hamim.

Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang kedua berdiri di Kauman pada 9 Juni 1929. Asal-usul mengenai pendirian Madrasah Nahdlatul Wathon Kauman terekam pada sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Mushola Rais Syuriah NU Semarang pertama, KH. Sya'ban di daerah Kauman. Musyawarah itu juga dihadiri oleh perwakilan Hoofdbestuur NU. Kiai Mas Alwi dan Kiai Abdullah Ubaid yang mewakili Hoofdbestuur NU berangkat menuju Semarang pada 30 Maret (18 Syawal 1347 H) untuk melaksanakan musyawarah bersama para pengurus NU Semarang. Kiai Mas Alwi hadir sebagai perwakilan Hoofdbestuur NU sekaligus Kepala Madrasah Nahdlatul Wathon. Mereka kemudian melakukan musyawarah pada 31 Maret 1929.⁵² Selain pendirian Madrasah Nahdlatul Wathon yang kedua, pokok bahasan lain dalam

⁴⁸ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 2 Tahun II Shafar 1347 H.

⁴⁹ Pendirian madrasah ini menjadi mandat organisasi untuk “Berichtiar memperbaikkan Madrasah-Madrasah jang berdasar Agama Islam.” Lihat, *Statuten Perkumpulan Nahdlotel Oelama 1926*, (Surabaya: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1930), Fatsal 3 poin d.

⁵⁰ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 1 Tahun II Muharam 1347 H.

⁵¹ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 1 Tahun II Muharam 1347 H.

⁵² *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 6 tahun II Jumadil Akhir 1347 H.

musyawarah yang dihadiri oleh kurang lebih 400 orang Kiai, Ba’alawi, Saudagar serta warga Semarang, adalah persiapan muktamar keempat NU.⁵³

Dalam musyawarah tersebut, ada empat orang yang berbicara; Haji Toha bin Husein (Presiden Madrasah Nahdlatul Wathon Kauman), Kiai Mas Alwi, Kiai Abdullah Ubaid, dan Kiai Ridlwan Mujahid. Tentang madrasah, musyawarah memutuskan (i) pengurus akan mencari tambahan dana sebesar 500 rupiah untuk menggenapi penunjang pengajaran seperti bangku dan lainnya. Sementara untuk gedung sendiri sudah tersedia. (ii) guru yang mengajar akan digaji tiap bulannya. (iii) murid akan ditarik bayaran kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu. (iv) kegiatan pembelajaran akan dimulai pada 1 Muharram 1348 (9 Juni 1929). (v) menetapkan kepengurusan Madrasah Nahdlatul Wathon yang dipimpin oleh Haji Toha sebagai Presiden.⁵⁴

Selain didirikan, upaya pengembangan fisik madrasah juga dilakukan. Untuk keperluan hal tersebut Pengurus NU Semarang yang dipimpin Haji Toha menggelar rapat pada 4 Januari 1931 di Madrasah Nahdlatul Wathon yang terletak di Kauman Dalam (Kaoeman Dalem). Warga NU Semarang berniat memindahkan lokasi madrasah ke Kampung Pungkuran yang masih berada di sekitar Kauman.⁵⁵ Setelah berjalan kurang lebih 20 bulan lebih, perhatian terhadap madrasah ini sangat besar. Pada pagi hari, ada 147 siswa yang belajar di madrasah dan 67 orang pada sore hari. Madrasah juga membuka kelas pada malam hari bagi kalangan pemuda dan orang tua. Dengan jumlah yang sedemikian besar, maka keterbatasan tempat menjadi alasan utama. Warga NU membeli sebuah gedung di Pungkuran seharga f 6500.⁵⁶

Madrasah Nahdlatul Wathon ketiga di Semarang berdiri di Distrik Brumbung. Pada 3 Agustus 1929, dalam sebuah pertemuan terbuka yang dihadiri oleh kurang lebih 1200 orang, diusulkan berdirinya sebuah madrasah. Ada 190 murid yang menuntut ilmu di madrasah tersebut. Kiai Ridwan, Kiai Sya’ban dan Haji Toha serta pengurus NU Semarang lainnya hadir dalam pembukaan madrasah tersebut.⁵⁷ Wakil Presiden Nahdlatul Wathon, Raden Syahid, serta Haji Abdullah bin Abdurrahim (dari Kampung Ngabangan Semarang) juga hadir. Pertemuan terbuka yang dimulai pukul 9 pagi tersebut memilih KH. Thoyyib sebagai Rais, Haji Anwar Mawardi (Naib Rais), Abdullah (Katib), Abdul Aziz (Naib Katib), Haji Abdur Rouf (Amin Shunduq 1), Abdur Rahman (Amin Shunduq 2), Haji Abdul Hamid, Nur, Ahmad, Muhyi dan Abdur Rasyid sebagai A’wan. Kegiatan pembukaan Madrasah Nahdlatul Wathon Brumbung ditutup pada pukul 11 siang.⁵⁸

Selain kegiatan belajar mengajar, aktivitas tahunan di Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang seperti halnya imtihan atau ujian kenaikan tingkat juga dilaksanakan sebagaimana mestinya. 26 Januari 1930 atau bertepatan dengan 25 Sya’ban 1348 H, salah satu Madrasah

⁵³ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 6 tahun II Jumadil Akhir 1347 H.

⁵⁴ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 6 tahun II Jumadil Akhir 1347 H.

⁵⁵ *Djawa Tengah*, 5 Januari 1931.

⁵⁶ *Djawa Tengah*, 5 Januari 1931..

⁵⁷ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 9 tahun II Ramadlan 1347 H.

⁵⁸ *Swara Nahdlotel Oelama (SNO)*, Nomor 9 tahun II Ramadlan 1347 H..

Nahdlatul Wathon di Semarang melaksanakan imtihan atau ujian.⁵⁹ Kegiatan Imtihan Madrasah Nahdlatul Wathon tersebut dimulai pukul 8 pagi. Pembukaan disampaikan oleh perwakilan Guru serta murid, Haji Abdul Halim. Ia menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada hadlirin yang ada di tempat tersebut. Tak lama kemudian, ujian dimulai.

Separuh murid dari madrasah tersebut membaca kitab dan menjelaskan isinya dengan Bahasa Jawa. 8 orang murid melakukan tanya jawab sesama sebayanya dalam pelajaran Shorof (morphology), Nahwu (syntax), Tajwid serta ilmu lain seperti Fiqh, atau Tauhid. 26 murid lainnya menyampaikan ceramah kepada temannya, dengan mengutip al-Qur'an, Hadits, Pendapat ulama dan lainnya. Ada salah satu murid madrasah yang berasal dari Melayu sehingga menyampaikan ceramahnya juga dengan Bahasa Melayu. Usai imtihan, salah seorang guru madrasah kemudian naik ke atas panggung dan menyampaikan permohonan maaf kepada hadlirin barangkali selama dalam proses ujian itu ada siswa madrasah yang kurang sopan berbicara dan bertingkah laku. Ia lantas meminta Kiai Ridwan Mujahid untuk memberikan nasihat.

Mustasyar Hoofdbestuur Nahdlotoel ‘Oelama pertama tersebut berdiri dari tempat duduknya. Kepada para murid yang mengikuti ujian, serta tamu-tamu yang hadir ia memberi nasihat yang sangat filosofis. Beliau menjelaskan dengan sangat bernalas membabar sebuah kaidah reflektif; *Az-Zamanu sulthonun kabir. Wal mar u ibnu zamanihi*. Terjemahan bebasnya, zaman adalah penguasa besar (*great ruler*) dan manusia adalah anak zamannya. Zaman disebut sebagai penguasa besar karena secara sederhana, waktu bisa memengaruhi segala sesuatu, mulai dari perubahan sosial, politik, budaya dan lainnya. Sementara, manusia adalah anak zaman, yang membuatnya tidak bisa lepas dari konteks historis sosialnya. Pengaruh lingkungan akan membentuk manusia sebagai “anak zaman.”

Setelah nasihat oleh Kiai Ridwan Mujahid, Raden Masyhadi, Wakil Presiden NU Cabang Semarang yang baru saja tiba dari Surabaya untuk bertemu dengan Haji Abdul Kohar dari Hoofdbestuur, menutup acara. Ia menyampaikan salam takdzim dari Hoofdbestuur Surabaya khususnya kepada warga NU Semarang.

Siswa dari Madrasah Nahdlatul Wathon juga turut memeriahkan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad. Sabtu (malam), tanggal 29 Mei 1937 warga NU Semarang melakukan arak-arakan dalam rangka Maulid Nabi.⁶⁰ Kegiatan dimulai pada pukul 19.00. 700 orang peserta yang merupakan siswa sekolah NU di Semarang berangkat dari Kampung Pungkur lanjut ke Kauman, alun-alun Masjid Agung Semarang, Pedamaran lalu kembali ke Pungkur. Kegiatan serupa, di tempat yang sama, juga dilakukan pada 7-8 Juli tahun 1934. Kegiatan tersebut, dipimpin, salah satunya oleh Kiai Sya'ban.⁶¹ Yang menarik, sempat tersiar kabar kalau NU Semarang tidak melakukan arak-arakan peringatan

⁵⁹ *Swara Nahdlotoel Oelama (SNO)*, Nomor 11 Tahun II Syawal 1347 H.

⁶⁰ *Djawa Tengah*, 31 Mei 1937.

⁶¹ *Pewarta Arab*, 12 Juli 1934.

Isra Mi'raj karena dianggap berbau barat.⁶² Tentang kebangkitan dakwah NU Semarang, koran "De Locomotief" mengabarkan kalau organisasi ini menggelar dakwah besar di Kauman yang dihadiri banyak orang pada September 1936.⁶³ Pada Muktamar 1935 di Surakarta, NU Semarang menyampaikan perkembangan dakwah dan organisasi. Selain mendirikan kring atau ranting di level kelurahan/desa, NU Semarang juga telah memiliki 7 madrasah.⁶⁴

4. Madrasah Nahdlatul Wathon dalam Kerangka Kebijakan Pemerintah Kolonial

Pengurus Hoodbestuur Nahdlatul Wathon menggambarkan kehadiran madrasah ini sebagai fasilitasi bagi masyarakat muslim untuk pengajaran ilmu-ilmu keislaman, selain juga ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa asing (Arab dan Belanda) dan matematika. Perluasan madrasah ini ke berbagai kota merupakan langkah strategis dan menjadi lebih masif dan terorganisir setelah NU berdiri. Sebagai bagian dari jejaring yang besar, Madrasah Nahdlatul Wathon tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tetapi menandai hadirnya format baru lembaga pendidikan dengan isi yang bersumber dari tradisi pesantren namun kemasan yang berbeda. Pola yang dilakukan oleh NU dalam hal pembaharuan model pendidikan ini yang oleh Steenbrink diistilahkan dengan "menolak dan mencontoh."⁶⁵ Dalam bahasa lain, saya menyebutnya sebagai *selective borrowing*, proses yang dilakukan oleh NU melalui Madrasah Nahdlatul Wathon adalah peminjaman dengan selektif; menerima wadah tapi menolak substansinya.

Betapapun ada proses adaptasi, tetapi keberhasilan pengembangan madrasah yang ditandai penerimaan warga NU tidak bisa dilepaskan dari pengalaman internal yang dimiliki oleh pesantren sendiri. Pada 1916, Pesantren Tebuireng mendirikan Madrasah Salafiah dengan format klasikal untuk pengajian Al-Qur'an. Tahun 1925, salah satu keponakan KH. Hasyim Asy'ari, KH. Moh Ilyas, seorang lulusan HIS menetap di Tebuireng dan menjadi pengawas di sebagian pesantren lalu menjadi kepala sekolah pada 1929.⁶⁶ Bersama KH. Wahid Hasyim memainkan peran dalam proses modernisasi pendidikan di Tebuireng melalui madrasah tersebut. Atas persetujuan KH. Hasyim Asy'ari, Moh. Ilyas memasukkan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah dan Melayu Melayu. Sejak saat itu, koran berbahasa Melayu bisa masuk pesantren.⁶⁷

Dikenal sebagai lembaga pendidikan tempat belajar kalangan muslim konservatif, tetapi faktanya, Pesantren Tebuireng justru sangat terbuka dalam pembaruan pesantren. Sistem klasikal serta adopsi pelajaran non-agama dalam madrasah mencerminkan sisi lain dari lembaga pendidikan keagamaan tradisional tersebut. Meski begitu, modernisasi yang

⁶² G.F Pijper, *Fragmenta Islamica: Studien over het islamisme in Nederlandsch-Indies* (E.J. Brill, 1934), h. 146.

⁶³ *De Locomotief*, 19 September 1936.

⁶⁴ *Swara Nahdlotel Oelama*, Nomor 11 Tahun III Dzulqa'idah, 1348 H.

⁶⁵ Karel A. Steenbrink, Pesantren, *Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, h. 65.

⁶⁶ Karel A. Steenbrink, Pesantren, *Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, h. 70.

⁶⁷ Karel A. Steenbrink, Pesantren, *Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, p. 71.

dilakukan tersebut ternyata tidak sepenuhnya bisa diterima dan memunculkan resistensi. Sejumlah orang tua memindahkan anak-anaknya dari Tebuireng karena menganggap pesantren ini sudah terlalu modern. Di sini, gambaran Steenbrink tentang "menolak" juga bisa bermakna lain, yakni penolakan dari sebagian kalangan muslim tradisional atas upaya NU ketika "mencontoh" model pendidikan klasikal.

Perluasan Madrasah Nahdlatul Wathan di Semarang menggambarkan tidak hanya meluaskan organisasi NU, tetapi juga format lembaga pendidikan yang memiliki nuansa baru tersebut. Kehadiran Madrasah Nahdlatul Wathan pasca berdirinya NU bisa dibaca tidak hanya sekadar sebagai berdirinya sebuah institusi pendidikan, tetapi juga respons atas situasi sosial tertentu. Selain memperkuat sumberdaya manusia bumiputera dalam aspek keagamaan, kehadiran madrasah juga bisa dibaca dalam kerangka kebijakan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan pendidikan.

Pada 1905 pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Guru yang wajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin dari Bupati, mengisi daftar murid yang sewaktu-waktubisa diperiksa oleh Bupati, dan jika melanggar ketentuan bisa sihukum delapan hari atau denda 25 rupiah.⁶⁸ Peraturan tersebut termuat dalam Staatsblad 1905 nomor 550. Setelah mendapatkan reaksi dari kalangan muslim, dan pemerintah merasa sudah tidak mengintai guru, ordonansi tersebut kemudian direvisi pada 1925. Pada aturan baru, guru hanya menunjukkan bukti pemberitahuan.⁶⁹ Betapapun ada pembaruan, tetapi peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1929 nomor 219 tersebut tetap menjadi aturan yang menghambat perkembangan pendidikan Islam. Aturan baru ini tetap membuka ruang bagi pemerintah untuk mengawasi dan bahkan menghukum guru agama melakukan pelanggaran atas aturan tersebut.

Kebijakan pendidikan lain pemerintah era kolonial adalah ordonansi pengawasan sekolah partikelir (*Toezicht-Ordonnantie Particulier Onderwijs*) yang dikeluarkan pada tahun 1932.⁷⁰ Pemerintah kolonial menekan anggaran belanja pendidikan karena terjadi krisis ekonomi.⁷¹ Karena kebutuhan tinggi akan pendidikan, bermunculanlah sekolah-sekolah yang tidak disubsidi pemerintah. Anehnya, pemerintah bukannya mendorong sekolah-sekolah swasta yang diupayakan secara mandiri oleh lembaga atau organisasi, tetapi justru melakukan pengawasan atasnya. Karena mendapatkan reaksi yang keras, pemerintah kemudian menarik peraturan ini pada Februari 1933.⁷²

Kebijakan mengenai ordonansi guru dan ordonansi pengawasan sekolah partikelir ada dalam situasi dimana Nahdlatul Wathan lahir dan berkembang. Secara organisatoris, NU

⁶⁸ *Perkara Agama Islam Boemipoetera*, (Batavia: Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, 1920), h. 12-25.

⁶⁹ *Perkara Boemipoetera yang Berkaitan dengan Agama Islam*, (Batavia-Centrum: Balai Poestaka, 1934, Cetakan Ketiga), h. 11-31.

⁷⁰ *Ordonansi Pengawasan Sekolah Partikelir*, (Batavia-Centrum: Balai Poestaka, 1934).

⁷¹ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 61.

⁷² H. Aqib Suminto, *Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 63.

sendiri meminta pencabutan ordonansi guru pada tahun 1940⁷³ setelah hal tersebut menjadi pembicaraan penting dalam Muktamar ke-14 di Magelang pada 1939.⁷⁴ Tak hanya itu, NU juga meminta agar pemerintah kolonial membebaskan pajak bagi para guru madrasah-madrasah NU.⁷⁵ Jika diletakkan dalam konteks kebijakan pemerintah kolonial, maka aktivitas yang berjalan di madrasah Nahdlatul Wathon sesungguhnya menghadapi situasi yang tak mudah, karena pemerintah kolonial bisa melakukan intervensi jika melihat bahwa ada situasi yang membahayakan keamanan dan ketertiban yang dipercikkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

5. Transposisi-Translasi Kultural dan Konstruksi Identitas Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang

Dalam konteks dimana pemerintah kolonial sangat ketat mengawasi kegiatan keagamaan, maka kehadiran Madrasah Nahdlatul Wathon bisa dibaca setidaknya dari dua sudut pandang; proses sosial dan konstruksi identitas. Dua hal tersebut akan menjadi alat analisis pada kemunculan dua madrasah Nahdlatul Wathon pertama di Semarang yakni yang berada di Jomblang dan Kauman. Meski ada dalam lanskap Kota Semarang, tetapi dua wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga analisis atas dinamika sosial serta bangunan identitas yang menjadi implikasi atas hadirnya madrasah itu juga memiliki kekhasannya sendiri.

Madrasah Nahdlatul Wathon merupakan adaptasi nilai-nilai pesantren yang ditransformasikan dalam bentuk kelembagaan baru. Dari aspek kurikulum, etika santri serta otoritas kiai, apa yang diajarkan di madrasah merupakan substansi yang juga diterima oleh para santri di pesantren. Ketika melakukan pengamatan terhadap proses transformasi keilmuan Islam di Jawa akhir abad 19, Izaak Johannes Brugmans mengatakan kalau pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang sejati selain langgar dan surau, adalah lembaga yang sepenuhnya bersifat teologis dan tidak pernah berkembang menjadi institusi pendidikan yang memajukan.⁷⁶ Baru pada awal abad 20 organisasi Islam seperti Muhammadiyah mendirikan sekolah yang memungkinkan subsidi pemerintah bisa diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Sebagai pabrik pengetahuan yang bersifat teologis itu, pesantren bisa menyalurkannya kepada madrasah sebagai institusi pendidikan non-pesantren.

Sebagai bagian dari proses sosial, transformasi nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam bentuk madrasah modern dipahami sebagai apa yang dalam studi translasi disebut sebagai

⁷³ Surat kepada Pemerintah Kolonial Belanda 10 Juli 1940 bisa dibaca dalam lampiran XIV buku Choirul Anam, Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 62-63.

⁷⁴ Heru Sukadri, *Kiai Haji Hasjim Asy'ari: Riwayat Hidup dan Pengabdianya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), h. 100.

⁷⁵ Surat Kepada Gubernur Hindia tentang pembebasan pajak guru tertanggal 19 Januari 1940 bisa dibaca dalam lampiran XII buku Choirul Anam, h. 60.

⁷⁶ I.J. Brugmans, *Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*, (Groningen-Batavia: J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij, 1938), h. 210.

transposisi,⁷⁷ sebuah perubahan dalam gramatikal atau frasa. Perubahan itu terjadi dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengubah makna. Apa yang disebut dengan transposisi bisa dimengerti sebagai proses dimana *the same meaning can be conveyed by different word classes* atau makna yang sama dapat disampaikan melalui kelas kata yang berbeda.⁷⁸ Perubahan yang bersifat transformatif ini terjadi untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi sebagai respons atas perubahan zaman.

Transformasi nilai pesantren ke institusi baru bernama Madrasah Nahdlatul Wathan bisa dilihat tidak hanya perubahan struktur kelembagaan, tetapi lebih tepat dibaca sebagai bentuk transposisi kultural (*cultural transposition*), yakni upaya untuk mentransfer nilai-nilai inti pendidikan pesantren ke dalam kerangka pendidikan modern yang hadir untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, tanpa menghilangkan akar sebagai muslim tradisional. Perubahan ke dalam sistem madrasah bukan hanya tentang wadah atau struktur tetapi juga nilai, makna dan praktik budaya baru untuk menjaga kesinambungan. Tujuan dari transposisi kultural pesantren ke madrasah ini tergambar dalam tiga aspek; menyesuaikan dengan konteks baru, mempertahankan makna dan memungkinkan keberlanjutan dalam situasi sosial yang berbeda.

Dalam konteks kolonial, ketika model pendidikan Belanda semakin mendominasi, madrasah seperti Nahdlatul Wathan menawarkan model yang "menolak dan mencontoh," menolak sekularisasi sistem kolonial, namun mencontoh format strukturalnya, seperti kelas, kurikulum, dan sistem evaluasi. Nilai-nilai khas pesantren seperti keilmuan berbasis kitab kuning, relasi guru-murid, dan spiritualitas Islam tetap dipertahankan, namun dibungkus dalam sistem klasikal yang lebih modern. Proses ini menandai sebuah transformasi sosial-keagamaan yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga ideologis.

Transposisi kultural juga bisa didudukkan sebangun dengan apa yang oleh Homi K. Bhabha sebut sebagai *cultural translation* atau translasi kultural.⁷⁹ Bhabha menjelaskan translasi kultural dalam konteks kebaruan atau *newness*. Dalam ruang yang bersifat ambivalen antara budaya kolonial dan lokal, selalu muncul "kebaruan" sebagai hasil dari translasi kultural. Proses *cultural translation* ini tidak hanya sekadar penerjemahan literal tetapi juga proses negosiasi makna yang berjalan dalam ruang dominasi serta resistensi budaya. Perubahan yang

⁷⁷ Dalam studi penerjemahan, transposisi bisa dipahami sebagai perubahan struktur gramatikal atau bentuk kata dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengubah makna utama. Misalnya kalimat "He gave a smile" dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan "Dia tersenyum." Di sini terjadi perubahan dari kata benda (*a smile*) ke kata kerja (tersenyum). Tetapi perubahan gramatikal ini tidak mengubah maknanya. Perubahan lainnya adalah kata kerja ke frasa nominal dan pergeseran susunan frasa (aktif menjadi pasif). Jean-Paul Vinay dan Jean Darbelnet mengatakan transposisi selalu "...involves replacing one word class with another without changing the meaning of the message." Lihat dalam Jean-Paul Vinay dan Jean Darbelnet, *Comparative Stylistics of French and English: A methodology for translation*, (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995), h. 36.

⁷⁸ Jean-Paul Vinay dan Jean Darbelnet, *Comparative Stylistics of French and English: A methodology for translation*, h. 94.

⁷⁹ Homi K. Bhabha, *The Location of Culture*, (London and New York: Routledge, 1994), h. 212-3.

terjadi dalam transposisi-translasi ini tidak sebatas teknis dan fungsional, tetapi lebih dari itu, transformasi terjadi secara simbolik serta ideologis.

Translasi kultural merupakan upaya menerjemahkan nilai-nilai satu sistem budaya ke dalam sistem budaya lain, di mana proses adaptasi ini menciptakan makna baru yang hibrid. Dalam konteks kolonial, translasi ini tidak bersifat pasif atau sepenuhnya asimilatif, melainkan bersifat strategis dan produktif. Ruang baru bernama madrasah, hadir karena dalam lembaran panjang sejarah pendidikan Islam, terkandung apa yang oleh Bhabha sebut sebagai *the space of the ‘untranslatable’*.⁸⁰ Madrasah adalah tempat bertahannya nilai-nilai pesantren yang tidak bisa sepenuhnya direduksi oleh logika pendidikan model kolonial. Relasi kiai-santri yang khas, konsep ilmu yang bernilai ibadah, serta penekanan atas keberkahan melampaui struktur kurikulum adalah “ruang yang tak bisa sepenuhnya diterjemahkan.”

Selain sebagai pertahanan kultural, madrasah arena negosiasi dengan fondasi struktur hibrid. Dalam proses hibridisasi itu, ada unsur pesantren yang tidak bisa sepenuhnya diakomodir oleh mekanisme pendidikan modern. Di sana, ada ruang makna dan pengalaman budaya yang tetap hidup, tetapi tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya. Madrasah Nahdlatul Wathon adalah ruang ketiga (*third space*)⁸¹ yang memediasi antara tradisi dan modernitas, antara kolonial dan pribumi, antara pesantren dan sekolah. Translasi ini memungkinkan terbentuknya identitas keagamaan yang adaptif namun tetap memiliki kesinambungan sejarah serta spiritualitas.

Kehadiran Madrasah Nahdlatul Wathon di Semarang, tidak hanya tentang bagaimana transposisi-translasi di lembaga pendidikan, tetapi juga meneguhkan identitas masyarakat muslim tradisional. Menariknya, peran madrasah Nahdlatul Wathon di Semarang tidak seragam secara spasial. Makna kehadiran Madrasah Nahdlatul Wathon di wilayah Kauman dan Jombang memiliki sedikit perbedaan. Bagi warga NU di Semarang awal abad 20, Kauman dan Jombang memiliki struktur serta dinamika sosial yang berbeda. Karenanya, transformasi identitas keislaman di dua daerah tersebut memiliki langgam serta fungsi yang sedikit berbeda.

Identitas muslim Kauman, seperti halnya ciri dari ruang ini di berbagai wilayah Pulau Jawa dicirikan oleh lingkungan religius yang kuat. Kauman adalah lingkungan yang sangat Islami dimana langgar, pesantren, komunitas ulama serta tradisi keislaman menjangkar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Jika mencermati latar belakang mereka yang tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama Semarang pertama tahun 1928, semuanya adalah ulama atau kiai yang berasal dari Kauman.

Kauman merupakan wilayah dengan tradisi keagamaan mapan dan bisa dikatakan sebagai pusat kehidupan masyarakat muslim tradisional. Kauman menjadi area dengan kepadatan institusi keagamaan (*religious institutional density*) yang tinggi. Tradisi pengajian

⁸⁰ Homi K. Bhabha, *The Location of Culture*, (London and New York: Routledge, 1994), h. 225.

⁸¹ Kata Bhabha, ruang ketiga tercipta ketika negosiasi atas perbedaan yang tidak sepadan menciptakan ketegangan yang khas bagi kehidupan di wilayah perbatasan. *Ibid.*, h. 218.

dan pendidikan non-formal sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dalam ruang seperti itu, madrasah bukanlah satu-satunya aktor pendidikan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Islam yang sudah mapan. Madrasah di Kauman (termasuk Nahdlatul Wathon) tidak muncul dalam kekosongan, tapi dalam konteks adaptasi dan dalam batas-batas tertentu, persaingan. Kehadirannya bisa dikatakan sebagai *symbolic rivalry* dengan kelompok lain yang bisa dilihat dalam metode pengajaran, kurikulum, jejaring sosial hingga otoritas keagamaan. Madrasah Nahdlatul Wathon Kauman juga menjadi kanal baru dalam konteks perluasan strategi dakwah berbasis untuk menyaingi sistem kolonial, mengeratkan massa santri, dan merespons modernisasi pendidikan.

Beda halnya dengan Kauman, Jomblang merupakan wilayah di Semarang dengan karakteristik sebagai kawasan pemukiman baru di Semarang pada abad 20, meski tentu saja tidak baru sama sekali. Jomblang adalah salah satu kawasan dimana mayoritas warga pribumi tinggal di sana.⁸² Posisinya ada di daerah pinggiran kota tetapi memiliki akses yang dekat dengan jalan raya. Akses kereta api dari Stasiun Sentral di Jurnatan (wilayah dekat Kauman) menuju Jomblang telah beroperasi sejak 1 Desember 1882 sejauh 4.4 kilometer.⁸³ Dengan tersedianya transportasi kereta api di dalam kota memudahkan penduduk yang berada di wilayah pinggiran seperti Jomblang untuk mengakses kawasan sentral.

Situasi sosial keagamaan di Jomblang, meski berbeda dengan Kauman, sejatinya tidak merupakan ruang hampa agama. Di Jomblang telah ada masjid yang diperkirakan sudah eksis sejak tahun 1830-an. Pengurus NU Cabang Semarang meresmikan masjid pada 16 November 1933. Peresmian tersebut dilakukan bukan atas kegiatan pembangunan tetapi renovasi masjid. “Djawa Tengah,” Koran Tionghoa Peranakan Berbahasa Melayu yang berkantor di Semarang, memberitakan bahwa masjid itu sendiri sudah berdiri kira-kira satu abad lamanya sebelum kemudian direnovasi.⁸⁴ Keberadaan masjid tersebut menandakan bahwa bahwa komunitas muslim di kawasan ini telah lama terbentuk dan memiliki praktik keagamaan yang mapan.

Yang membedakan dengan Kauman adalah di wilayah Jomblang, tidak ada pesantren sebagai lembaga pendidikan. Ruang religius di Jomblang belum sepenuhnya terlambaga pada wadah seperti pesantren. Dalam konteks inilah, madrasah Nahdlatul Wathon hadir bukan sebagai pelopor Islamisasi, melainkan sebagai pengisi kekosongan institusional—menyatukan nilai-nilai pesantren dengan kebutuhan pendidikan masyarakat urban yang berkembang pesat. Maka, madrasah ini tidak hanya mencerminkan transformasi kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses urbanisasi yang bersifat keagamaan, di mana ruang kota baru diproduksi secara sosial dan religius sekaligus.

⁸² Radjimo Sastro Wijono, *Modernitas dalam Kampung: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20*, (Jakarta: LIPI Press, 2013), h. 44

⁸³ Baron van der Goes van Nootdorp dan C.L.J. Martens, C.L.J., *Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het Vijf en Twintig-Jarig Bestaan der Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij*. (Den Haag: Koninklijke Nederlandse-Boek en Kunsthandel van M.M. Couvee, 1907), h. 68.

⁸⁴ *Djawa Tengah*, 4 September 1933.

Madrasah Nahdlatul Wathon di Jomblang menjadi simbol pembentukan identitas kolektif baru yang religius, tapi juga modern. Selain dilakukan melalui proses pewarisan, identitas keislaman juga dikonstruksi melalui pendidikan model kaum urban dengan tetap mempertahankan semangat “pedesaan.” Madrasah di Jomblang bukan sekadar tempat belajar, tapi menjadi “institusi pencetak identitas” di tengah kawasan baru yang sedang mencari bentuk komunitas religiusnya. Ruang religius perkotaan dicipta melalui madrasah termasuk Masjid Jomblang. Keduanya tidak hanya menjadi tempat di mana ajaran agama disalurkan, tetapi juga arena dimana identitas dikonstruksi.

Kehadiran madrasah juga menghadirkan diferensiasi institusional meski secara tempat mungkin tidak berbeda. Seperti terbaca dalam sejarah Madrasah Nahdlatul Wathon Jomblang, anak-anak pada awalnya belajar di serambi masjid, karena gedung belum ada. Meski begitu, diferensiasi institusional tetap bisa dilihat. Masjid menjadi pusat ibadah ritual komunitas NU setempat. Sementara, madrasah menjadi pusat pendidikan dan produksi pengetahuan. Kompleksitas sosial meningkat pada masyarakat urban muslim.

4. Kesimpulan

Pendirian madrasah oleh kalangan Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari arus urbanisasi serta modernisasi. Keinginan untuk mentransformasikan pada ruang urban, tidak bisa dilepaskan dari sejarah NU yang memang dideklarasikan di kota dan berkembang dari kota ke kota. Format madrasah dipilih sebagai wadah untuk mewadahi nilai-nilai pesantren agar bisa ditransformasikan. Latar belakang inilah yang bisa dipahami dalam konteks masyarakat Surabaya termasuk juga Semarang. Memperluas madrasah ke berbagai kota menjadi langkah strategis, terutama setelah NU berdiri. Pola yang dilakukan oleh NU dalam hal pembaharuan model pendidikan ini yang oleh Steenbrink diistilahkan dengan ”menolak dan mencontoh” atau meminjam secara selektif. Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang menjadi identitas pembeda dengan sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh organisasi lain seperti Muhammadiyah atau Sarikat Islam. Pembeda utamanya adalah nilai dan ajaran Islam seperti yang ada di pesantren sebagai bahan baku madrasah, hal yang tidak ditemukan di sekolah lainnya.

Sebagai bagian dari proses sosial, Madrasah Nahdlatul Wathon Semarang mencirikan apa yang saya sebut sebagai transposisi kultural atau translasi kultural dalam bahasa Bhabha. Madrasah Nahdlatul Wathon adalah nilai lama dalam bingkai baru. Ia tetap mempertahankan makna dan nilainya meski berada pada posisi berbeda (*cultural transposition*). Untuk audiens yang berbeda, kemasan yang dibutuhkan juga harus sesuai dengan karakter sosial dan kulturalnya. Madrasah tidak hanya melakukan penerjemahan secara harfiah tetapi juga negosiasi makna yang berjalan dalam ruang dominasi serta resistensi budaya.

Pada akhirnya madrasah Nahdlatul Wathon memiliki dua berfungsi berbeda bagi masyarakat Semarang. Di Kauman, di mana tradisi keulamaan yang kuat berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat mulai mengalami mobilitas sosial dan pendidikan, madrasah

adalah ruang baru untuk melakukan konsolidasi identitas sebagai muslim tradisional. Dalam konteks Jomblang, madrasah menjalankan peran untuk mengisi kekosongan kelembagaan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya ditopang oleh praktik ibadah komunal, sehingga kehadirannya bukan hanya mendidik, tetapi juga membentuk ruang religius baru di tengah dinamika urbanisasi. Kehadiran madrasah menandai artikulasi baru identitas keislaman di wilayah yang sedang tumbuh dan mencari bentuknya sendiri, terpisah sekaligus terhubung dengan dominasi simbolik Kauman.

Daftar Pustaka

- Ali, Abdul Mu'ti. *The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction*. Master's thesis, Institute of Islamic Studies, McGill University, 1957.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Atjeh, Aboebakar. *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Mei 1914.
- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. London and New York: Routledge, 1994.
- Blumberger, J.Th. Petrus. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*. Den Haag: H.D. Tjeenk Willink & Son, 1931.
- Brugmans, I.J. *Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indië*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij, 1938.
- Brumund, J.F.G. *Het Voksonderwijs onder de Javanen*. Batavia: van Haren Noman & Kolff, 1857.
- De Locomotief, 19 September 1936.
- _____. 25 Juli 1927.
- Djawa Tengah, 27 Mei 1921.
- _____. 31 Mei 1937.
- _____. 4 September 1933.
- _____. 5 Januari 1931.
- Halim, Abdul. *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab*. Bandung: Baru, 1970.
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 23 November 1915.
- Islam Bergerak, 1 April 1922.
- _____. 10 April 1917.
- Malaka, Tan. *Dari Penjara ke Penjara*. Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Nagazumi, Akira. *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908–1918*. Translated as *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908–1928*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910–2010*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Tedi Kholiludin, *Madrasah, Identitas, dan Kekuasaan Kolonial: Sejarah Madrasah Nahdlatul Wathan di Semarang, 1900–1940*.

Ordonansi Pengawasan Sekolah Partikelir. Batavia-Centrum: Balai Poestaka, 1934.

Pendidikan di Indonesia, 1900–1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900–1940. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Perkara Agama Islam Boemipoetera. Batavia: Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, 1920.

Perkara Boemipoetera yang Berkaitan dengan Agama Islam. Batavia-Centrum: Balai Poestaka, 1934. Cetakan Ketiga.

Pewarta Arab, 12 Juli 1934.

Pijper, G.F. *Fragmenta Islamica: Studien over het Islamisme in Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1934.

Poeze, Harry A. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2008.

Ridwan, Nur Khalik. KH. Abdul Chalim Leuwimunding: Anti Kolonial, Merintis Kemerdekaan dan Mendirikan NU 1890–1930. Yogyakarta: NDiko Publishing, 2024.

Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.

Shiraishi, Takashi. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990.

Shokeh, Muhammad. *Gerakan Keagamaan dan Perubahan Sosial: Dakwah Islam dan Misi Katolik di Semarang 1890–1940*. Pati: Kireinara, 2014.

Shokheh, Mukhamad, et al. “From Islamic Teaching to Social Charity: The Muhammadiyah Movement in Semarang, Central Java, Indonesia; 1926–1940.” *Asian Culture and History* 10, no. 2 (2018).

Sinar Hindia, 23 Agustus 1921.

Slade, Darren M. “What is the Socio-Historical Method in the Study of Religion?” *SHERM* 2, no. 1 (2020).

Soeara Ra’jat, 1–16 Juni dan 1 Juli 1921.

———. 16 Agustus 1921.

———. 30 April 1921.

———. 31 Agustus 1921.

Statuten Perkumpulan Nahdlotoel Oelama 1926. Surabaya: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1930.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Sukadri, Heru. Kiai Haji Hasjim Asy'ari: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Suminto, H. Aqib. Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985.

Swara Nahdlotoel Oelama (SNO), Nomor 2 Tahun II Shafar 1347 H.

_____. Nomor 1 Tahun II Muharam 1347 H.

_____. Nomor 11 Tahun II Syawal 1347 H.

_____. Nomor 6 Tahun II Jumadil Akhir 1347 H.

_____. Nomor 9 Tahun II Ramadlan 1347 H.

_____. Nomor 11 Tahun III Dzulqa'idah 1348 H.

van Dirxland, Baron van der Goes, and C.L.J. Martens. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het Vijf en Twintig-Jarig Bestaan der Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij. Den Haag: Koninklijke Nederlandse-Boek en Kunsthinkel van M.M. Couvee, 1907.

Vinay, Jean-Paul, and Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995.

Wijono, Radjimo Sastro. Modernitas dalam Kampung: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20. Jakarta: LIPI Press, 2013.